

# Kerjasama Militer dan Sipil dalam Perubahan Bidang Pendidikan Militer di Indonesia

Kuntum Chairum Ummah.

Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia  
e-mail: kuntum.ummah@trunojoyo.ac.id

*Abstract - The main task of the TNI is to guard and protect the nation and state according to the mandate of Law No. 32 of 2004 concerning the TNI, the TNI AD has the authority to carry out Military Operations Other Than War (OMSP). One of the tasks of OMSP is to integrate and collaborate with other institutions such as local governments, universities, mass organizations and the mass media. However, even though this law has been implemented for more than a decade, there has been no academic study that has analyzed the extent of the role and function of the Indonesian Army in cooperation with universities. This paper is the result of a study of the role and function of the Indonesian Army in cooperation in education with universities. The research approach was carried out qualitatively through a process of in-depth interviews with informants. This study concludes that through cooperation to improve military education, the TNI AD can play its role and function in encouraging the development process in regions that correlate with the fulfillment of various public interests.*

**Keywords:** *Military, Education, TNI AD, TNI-Civil Cooperation*

**Abstrak** - Tugas pokok TNI untuk menjaga dan melindungi bangsa dan negara sesuai amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang TNI, TNI AD memiliki kewenangan untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah satu tugas dari OMSP adalah melakukan integrasi dan kerja sama dengan institusi lain seperti pemerintah daerah, universitas, organisasi massa dan media massa. Namun, meskipun undang-undang ini telah dilaksanakan lebih dari satu dekade, belum ada kajian akademis yang menganalisis sejauh mana upaya kerjasama militer dengan universitas. Tulisan ini merupakan hasil kajian kerjasama di bidang pendidikan dengan universitas. Pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif melalui proses wawancara mendalam terhadap informan. Kajian ini menyimpulkan melalui Kerjasama perbaikan Pendidikan militer maka TNI AD dapat memainkan peran dan fungsinya dalam mendorong

proses pembangunan dan perubahan di daerah yang berkolerasi dengan terpenuhinya berbagai kepentingan publik.

**Kata Kunci:** Militer, Pendidikan, TNI AD, Kerjasama TNI-Sipil

## I. PENDAHULUAN

Militer di Indonesia telah berupaya melakukan restrukturisasi dan kerjasama dengan masyarakat yaitu dengan memposisikan diri sebagai pihak yang turut menciptakan keteraturan sosial. Pada era pasca kemerdekaan Indonesia dengan anggapan bahwa masih terdapat ancaman terhadap negara khususnya ancaman terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan kekhawatiran akan kemungkinan ideologi bangsa Indonesia ‘terganggu’ oleh masuknya ideologi lain Berawal konsep “Jalan Tengah” yang dikemukakan oleh A.H Nasution dan doktrin “Tri Ubaya Cakti” yang melegitimasi Dwifungsi ABRI bahwasanya militer memiliki tiga tugas utama yaitu pertahanan darat nasional, doktrin kekarya dan doktrin pembinaan. Militer dan sipil merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan doktrin Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishanta). Namun demikian, kajian-kajian tentang bagaimana Kerjasama TNI AD dalam melakukan perbantuan kepada sipil terutama dalam menopang pencapaian kegiatan pembangua pemerintah merupakan topik yang menarik untuk dikaji dan memungkinkan TNI AD di Indonesia untuk bersama-sama menyukseskan program pembangunan. Beberapa di antaranya adalah Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI/POLRI, yang menegaskan dan mengatur tentang Jati Diri dan Peran TNI, Susunan dan Kedudukan TNI serta Tugas Bantuan dan Keikutsertaan TNI dalam penyelenggaraan Negara.

Sebagai bentuk upaya menjalankan tugas pokok TNI untuk menjaga serta melindungi kedaulatan bangsa dan negara maka militer sebagai institusi pertahanan melakukan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dengan melakukan kerjasama dengan

institusi lain (sipil) untuk memberantas terorisme, penanggulangan bencana, dan membantu pemerintah daerah. Sebagai upaya mewujudkan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta) militer dan sipil dalam melakukan tugasnya dapat saling bekerjasama memaksimalkan segenap potensi dan sumber daya nasional untuk menghadapi ancaman keberlangsungan bangsa.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui penggunaan kekuasaan militer dalam konteks demokrasi yang dimaknai dari peran dan fungsinya dalam kerjasama meningkatkan pembangunan nasional melalui perubahan di bidang pendidikan militer. Menurut Desch (1995), stabilitas keamanan perlu diperkuat dengan membangun kemitraan (*partnership*) secara sejawat antara sipil dengan militer sesuai dengan kompetensi masing-masing yang menekankan pada kinerja (*performance*) dalam sistem kemasyarakatan, pemerintahan, dan kenegaraan.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memberikan penjelasan dan uraian berdasarkan data dan informasi yang diperoleh selama penelitian dengan menggunakan logika induktif dan menggunakan analisis deskriptif. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus untuk mempelajari kerja sama militer di Indonesia dalam konteks yang alami (natural) tanpa adanya rekayasa dan intervensi. Studi kasus dipilih karena penggunaannya tidak digiring oleh persepsi dan pikiran dari peneliti. Penentuan informan didasarkan pada kemampuan dan pengetahuan informan menjelaskan pola dan sistem sosial serta proses pendidikan dan kerjasama militer dan sipil di Indonesia.

Cara pemilihan informan menggunakan *purposive sampling* dimana informan yang dianggap paham untuk menjelaskan karakteristik kerjasama militer dengan sipil di Indonesia yang dianggap mampu dan cocok untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti berdasarkan kriteria tertentu. Pengumpulan data digunakan melalui kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan berupa dokumen, juklak, juknis, foto dan arsip.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola hubungan sipil dengan militer yang mengedepankan supremasi sipil terhadap militer (*civilian supremacy upon the military*) merupakan tonggak utama dalam suatu sistem sosial demokratis dimana militer tunduk kepada kebijakan yang dihasilkan oleh institusi sipil yang demokratis dan pengertian yang baik akan hubungan sipil-militer melalui perubahan fungsi peran, nilai, tugas, struktur serta budaya baik di institusi sipil maupun institusi militer.

Kajian dalam perspektif sipil yang dominan terdapat dua jenis pola hubungan Kerjasama antara sipil dengan militer yaitu CMR/ Civil Military Relationship dengan kontrol sipil subjektif dan kontrol sipil Objektif dimana profesionalisme militer yang tinggi dan pengakuan pejabat militer akan Batasan profesionalisme bidang mereka. Terdapat subordinasi militer terhadap pimpinan representasi sipil dan militer tunduk terhadap keputusan pimpinan sipil mengenai kebijakan yang berlandaskan azas profesionalisme.

Kontrol sipil subjektif adalah pemaksimalan kekuasaan kelompok sipil dan meminimalkan kekuasaan militer agar militer dapat dengan maksimal menjalankan tugasnya jika berada di lingkungan masyarakat. Kontrol sipil yang digunakan secara objektif akan menciptakan kegiatan militer yang efektif. Kontrol ini memisahkan konsep prajurit yang profesional dan mengakhiri masa 'nations in arms' yang mengutamakan mobilisasi massa dan eksploitasi sumber daya alam dalam upaya melawan musuh.

Kerjasama sipil-militer dalam negara berkembang didominasi oleh peranan militer yang mendekati model *civil-military coalitions* dimana militer terlibat dalam mendukung kekuasaan sipil. Kemampuan Kerjasama ini sangat bergantung kepada kemampuan sipil untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan militer. Masuknya militer kedalam permasalahan non militer (operasi militer selain perang) disebabkan adanya kebutuhan dari masyarakat untuk melibatkan militer yang dianggap memiliki kelebihan dibandingkan kelompok sipil dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional.

Adanya anggapan bahwa militer sendiri haruslah terlibat dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia berupaya menjelaskan tawar-menawar Kerjasama yang dilakukan pemimpin sipil dan militer untuk meminimalisir konflik yang mungkin dapat terjadi. Idealnya, Kerjasama antara sipil dengan militer tidak membutuhkan kegiatan saling memonitor atau pantauan yang intensif agar dapat melaksanakan tugas (tidak lalai). Kemungkinan militer bergantung pada sipil untuk memenuhi peningkatan pelatihan di ilmu militer seperti pemenuhan staf guna mendukung profesionalitas, program Pendidikan militer dan peningkatan doktrin serta non militer seperti pengetahuan akan ancaman yang berdimensi, politik, ekonomi, ideologi, sosial, budaya, teknologi informasi, kesehatan dan keselamatan umum.

Asumsi bahwa keberlangsungan Kerjasama militer dengan sipil didasari pada konsensus diantara para anggotanya yang relatif stabil antara yang "dijaga" dengan "penjaga" menjadi dasar dalam masyarakat untuk mewujudkan Sishankamrata. Hal ini tertulis dalam UU RI No.34 tahun 2004 tentang TNI bahwa TNI bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai suatu negara yang demokratis, Indonesia haruslah dapat memisahkan diri dengan intervensi dan pengaruh militer. Posisi militer tidaklah dapat digunakan sebagai penjaga rezim suatu pemerintahan karena rentan akan penyalahgunaan untuk kebutuhan-kebutuhan yang memiliki kekuasaan. Dalam konteks kekinian, Sishankamrata dapat meliputi sishankamrata meliputi penyelenggaraan pembinaan sumberdaya untuk kepentingan pertahanan, mewujudkan iklim kerjasama sipil-militer yang sehat, ketegasan wewenang pertahanan dan keamanan, kesetaraan dalam kerjasama TNI dengan institusi lain dalam upaya mencapai tujuan nasional dan pembinaan sumber daya untuk kepentingan pertahanan yang tercantum dalam doktrin TNI. Saat ini, paradigma bahwa TNI merupakan institusi yang sejajar dengan institusi lain maka akan mampu meningkatkan kerjasama antara insititusi militer dan sipil.

Selain analisis terhadap kerjasama militer dan sipil juga diperlukan upaya untuk mengevaluasi program-program kerjasama sebagai bagian dari proses interaksi antar aktor yang tidak hanya bersifat interaksi semata tetapi juga harus terdapat struktur hubungan yang mengarah pada partisipasi dan peran aktor serta tuntutan untuk dapat menggabungkan atau berkolaborasi dalam menjalankan kerjasama dalam mencapai tujuan.

Perubahan kultur, doktrin, dan pendidikan dalam militer mengarah kepada upaya mengembalikan fungsi dan peran TNI dan menempatkan kembali TNI secara tepat dalam tatanan kehidupan nasional. Tugas utama militer Indonesia adalah menjaga dan memelihara kedaulatan bangsa dan negara. Pada zaman modern saat ini, militer senantiasa dituntut untuk tetap profesional dan militan serta transparan dalam melaksanakan tugasnya. Kerjasama antara sipil dan militer menuntut adanya sikap internal dari militer untuk terbuka agar dapat dicintai dan mencintai rakyat serta menjadi pelopor bagi kesejahteraan rakyat. Sikap hati-hati ketika menjalin kerjasama yang ditunjukkan oleh militer di Indonesia dapat dipahami sebagai proses setelah militer mengalami keterpurukan sejak runtuhnya Orde baru dimana militer diharuskan untuk menjalani proses panjang menghadapi pilihan-pilihan sulit, melakukan koreksi internal diri dan bertahun-tahun melakukan perbaikan sesuai dengan tuntutan agar tidak lagi terjebak dalam kerjasama-kerjasama sosial-politik.

Dari hasil wawancara diperoleh masukan setiap program yang diajukan Universitas selalum endapat respon positif dari pemda namun belum ditindak lanjuti secara tertulis berupa *MoU* sehingga hal tersebut tidak dapat berjalan secara berkelanjutan. Hal ini dapat disikapi ketika terjadi pergantian pejabat baik di lingkungan universitas maupun dinas militer sendiri. Kondisi tersebut menjadi kendalabagi pejabat baru dimana akan melaksanakan koordinasi ulang dengan instansi terkait, sementara program yang sudah dijalankansebelumnya berjalan secara bertahap yang butuh penyelesaian lebih lanjut. Agar program yang telah berjalan dapat dilanjutkan secara

efektif kerjasama antara univeristas seharusnya dipermanenkan dengan *MoU*. Dukungan anggaran dari pemerintah daerah maupun pusat terbatas hal ini dapat disikapi dengan penerapan proyek padat karya dengan melibatkan peran aktif civitas akademika dan masyarakat.

Proses pencapaian profesionalisme prajurit melalui pendidikan dan pelatihan yang memerlukan waktu lama, intensif dan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan sesuai dengan strata dan spesialisasi di lingkungan TNI. Proses pencapaian prajurit yang profesional berkualifikasi, kemampuan dan standar ideal tidak hanya membutuhkan fisik dan mental yang kuat tetapi juga seseorang prajurit yang ahli di bidangnya serta kecabangannya. Dimana kemampuan prajurit profesional ini memerlukan empat hal yaitu *expertise* (keahlian): profesionalisme yang berbasis pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan, pendidikan dan pengalaman baik berupa pendidikan formal (gelar, sertifikat, ijazah) maupun pendidikan non formal seperti penataran dan pelatihan suatu waktu dalam satuan militer, *Cohesiveness* (Esprit de Corps): jiwa korsa sebagai suatu semangat keakraban dalam suatu korps, *Responsibility* (Tanggung Jawab): perasaan bertanggungjawab akan kedaulatan bangsa dan melindungi warga negara serta berintegritas tinggi kepada pekerjaannya, dan *Discipline* (Disiplin): perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dianut organisasi sebagai cerminan dari sikap, etika dan mental.

Prajurit yang profesional ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 bahwa profesionalisme TNI sebagai salah satu jati diri TNI harus terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Kerjasama sipil dengan militer yang profesional pengakuan masyarakat terhadap TNI yang hingga saat ini masih berlanjut, namun secara umum masyarakat memahami bahwa kini telah terjadi perubahan.

Pendidikan dan pengalaman yang berbeda serta proses sosialisai yang berbeda menyebabkan perbedaan bahkan sesana prajurit TNI dalam bersikap. Adanya perbedaan dalam pendidikan formal maupun jenjang pendidikan karir TNI menyebabkan hierarki dan pembagian tugas yang sangat beragam dalam struktur organisasi TNI. Pendidikan sebelum era reformasi yang lebih menekankan kepada kemampuan fisik serta mental prajurit dalam menghadapi musuh seperti kemampuan menghancurkan, memusnahkan, perang, kemampuan tempur dan kemampuan bela diri. Kini, pasca reformasi tuntutan untuk TNI melakukan perubahan dengan mengadopsi pendidikan sipil yang lebih adaptif seperti kemampuan untuk menguasai teknologi, informasi serta

kemampuan untuk berfikir kritis melalui berbagai penerbitan karya tulis militer (Karlismil) sesuai dengan standar yang berlaku.

Sistem pendidikan militer kini dihadapkan kepada arus perubahan sosial dalam globalisasi yang harus diterima sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Perubahan sistem pendidikan militer yang sesuai merupakan salah satu alat yang dapat membantu dalam mempercepat proses terciptanya kerjasama sipil dan militer yang demokratis dengan kemampuan menyesuaikan diri serta mengaktualisasikan seluruh kekuatan melalui dialog-dialog yang bermanfaat untuk perkembangan sumber daya manusia militer agar dapat diterima sebagai bagian dari penjaga kedaulatan bangsa dan negara.

Arah perubahan saat ini memerlukan peran sipil dalam hal penyelenggaraan pertahanan nasional sangat dibutuhkan oleh militer untuk dapat membantu prajurit TNI dalam menjalankan tugas dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sumber daya prajurit yang profesional dan lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan yang modern akan dapat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan baik.

#### IV. SIMPULAN

Paradigma bahwa TNI merupakan institusi yang sejajar dengan institusi lain maka akan mampu meningkatkan kerjasama antara insititusi militer dan sipil. Mampu menghasilkan rasa kebangsaan dan mengurangi potensi-potensi munculnya konflik. Kerjasama antara militer dan sipil berperan efektif dalam upaya pemberantasan gerakan-gerakan separatisme, pemberantasan terorisme, menularkan semangat cinta bela negara, pengadopsian nilai-nilai militer terhadap organisasi lain seperti bela negara, organisasi pecinta alam, organisasi kepemudaan, dan organisasi massa lainnya ataupun sebaliknya dimana militer dapat mengadopsi nilai-nilai yang dimiliki oleh institusi sipil untuk diterapkan sesuai dengan kebutuhan institusi militer.

Selama masih terdapat kerjasama yang baik antara sipil dan militer maka selama itu juga akan terciptanya masyarakat sesuai dengan fungsinya dalam pencapaian keseimbangan dalam struktur masyarakat di Indonesia. Dalam pembagian tugas kerjasama antara militer dan sipil masing-masing institusi memiliki kontribusi bagi bangsa dan negara melalui sistem kontrol yang dapat dilakukan baik dari militer kepada sipil maupun pengawasan sipil terhadap militer. Sistem kontrol ini terlihat dari adanya kontrol yang ketat dari masyarakat dalam upaya reformasi TNI. Sistem kontrol ini dilakukan dengan langkah awal mengurangi peran politik militer lalu dilanjutkan dengan perubahan paradigma lama bahwa nantinya militer akan menjadi pemimpin bangsa menjadi pemimpin militer yang profesional dan memiliki keahlian kemiliteran yang ahli. Kontrol sipil terhadap militer meliputi kerjasama dan koordinasi sipil untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan

pertahanan dalam skala yang lebih besar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijoyo, Suwarno. 2002. *Preventive Defense: Tentara Nasional Indonesia*. Jakarta: Swadana Bangun Dinamika Dunia. h. 65.
- Bainus, Arry. 2012. *Mengatur Tentara*. Bandung: M63 Foundation dan Asosiasi Ilmu Politik (AIPI) Bandung. h. 228.
- Berlin, David Pion. 2009. *Defense Organization and Civil Military in Latin America*. Armed Forces and Society. vol. 35, no.3, h. 535.
- Desch, Michael. 1995. *Civilian Control of Military: The Changing Security Environment*. Baltimore: The John Hopkins University Press, h.7
- Donelly, Chris. 2006. *Handbook of the Sociology of the Military*. New York: Springer Science and Business Media. h. 29
- Huntington, Samuel. 2013. *Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Sipil- Militer*. Jakarta: Grasindo. h. 4-7.
- Kardi, K. 2015. *Democratic Civil Military Relations*. Jakarta: Pratama. h. 155-158.
- Sutoro, E. 2002. *Meletakkan Militer pada Posisi yang Sebenarnya*. Jakarta.